



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

TAHUN 2025

**DOKUMEN PERJANJIAN
KINERJA PERUBAHAN
(BIDANG)**

Nomor : 000.7.2/0599/300.05

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
(PK-P) BIDANG
TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA**



KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenannya Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 ini terselesaikan tepat waktu.

Perjanjian Kinerja Perubahan disusun sebagai wujud komitmen dalam mempertanggungjawabkan kinerja sebagai upaya membangun manajemen kinerja yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda, disesuaikan dengan visi dan misi Walikota Samarinda.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda ini.

Samarinda, 14 November 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Samarinda

YOSUA ADEN, S.STP.,M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Perjanjian Kinerja	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
BAB II. PERJANJIAN KINERJA	2
Tujuan Perjanjian Kinerja	2
Landasan Hukum	2
BAB III. Penutup	3
Lampiran	4



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai aturan untuk menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tercantum pada Renstra tahun 2025 - 2029.

Dengan ditetapkannya APBD Perubahan Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan.

Dengan adanya Perjanjian ini dapat digunakan untuk penilaian keberhasilan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tujuan Perjanjian Kinerja.

Tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur;
2. Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel;
3. Pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
4. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 388;
Ayat (1) , bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi“.
Ayat (2) , bahwa “Pasal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah“.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 tanggal 22 Juli Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 tanggal 11 Agustus Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025;
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 September Tahun 2025;



BAB III PENUTUP

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan dokumen yang berisikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator yang akan dicapai instansi pemerintah.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) dapat dijadikan sebagai bahan penilaian keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terdiri dari 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

Samarinda, 14 November 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Samarinda



YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIFTAHURRIZQA, SE
Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut Pihak Kedua :

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Samarinda


YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198305252001121003

Pihak Pertama
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Samarinda


MIFTAHURRIZQA, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197207101998031012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
 Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	80,5 Nilai 76,8 Nilai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penunjang Urusan :**Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota****Anggaran****Kegiatan :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	49.508.500
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	30.053.500
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	40.630.500
Total	Rp.	120.192.500
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	5.189.393.845
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	1.020.594.000
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	45.133.500
Total	Rp.	6.255.121.345
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	60.000.000
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	100.000.000
Total	Rp.	160.000.000
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	17.144.638
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	50.000.000
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	10.000.000
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	17.500.000

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	42.340.850
- Fasilitas Kunungan Tamu	Rp.	12.000.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	93.750.000
Total	Rp.	242.735.488
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	63.124.000
- Pengadaan Mebel	Rp.	10.000.000
Total	Rp.	73.124.000
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
- Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Rp.	160.978
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	12.604.638
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	22.647.750
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	453.000.000
Total	Rp.	488.413.366

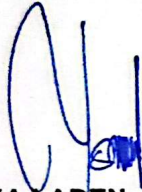
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 250.502.250
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Rp. 19.260.000
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 230.595.362

Total Rp. 500.357.612

TOTAL Rp. 7.839.944.311

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda



YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda
(PPTK)



MIFTAHURRIZQA, SE
NIP. 19720710 199803 1 012



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IDA ZURAIDAH, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut Pihak Kedua :

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Samarinda


YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198305252001121003

Pihak Pertama
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Kebangsaan,


IDA ZURAIDAH, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 197203021992932003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
 Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %

Program :
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Anggaran

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

– Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Rp. 278.500.000,-

– Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Rp. 1.340.000,-

- Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Rp. 123.169.000,-
- Pembentukan Paskibraka	Rp. 3.334.651.000,-
- Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp. 76.200.000,-
Total	Rp. 3.813.860.000,-

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda



YOSUA LADEN, S.STP., M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
dan Karakter Kebangsaan
(PPTK)



IDA ZURAIDAH, SE
NIP. 19720302 199293 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUNAWAROH,S.Sos.MM
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut Pihak Kedua :

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran penjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 November 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Samarinda

Pihak Pertama
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,

YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198305252001121003

MUNAWAROH,S.Sos.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 196903251991032004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
.	(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 %

Program :

Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Anggaran

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Rp. 3.963.467.905,-

- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp. 911.996.000,-
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp. 152.824.000,-
- Total Rp. 5.028.287.905,-**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda



YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
(PPTK)



MUNAWAROH, S.Sos,M.Si
NIP. 19690325 199103 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. SRI REPELITA,S.Sos,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **YOSUA LADEN, S.STP.,M.SI**
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut Pihak Kedua :

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 November 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Samarinda

YOSUA LADEN, S.STP.,M.SI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198305252001121003

Pihak Pertama
Kabid. Ketahanan Ekososbud, Agama Dan
Organisasi Kemasyarakatan,

Hj. SRI REPELITA S.Sos,M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 196901272001122001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
.	(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 % 100%

Program :

1. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Anggaran

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :

- | | |
|---|--------------------------|
| - Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Rp. 118.671.500,- |
| - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Rp. 101.458.875,- |
| Total | Rp. 220.130.375,- |

Program :

**2. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial Dan Budaya**

Anggaran

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang
Ekonomi Sosial dan Budaya :

- Pelaksanaan Koordinasi Di bidang Ketahanan Ekonomi,
sosial Budaya, dan fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah.
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Rp. 100.453.250,-

Rp. 1.039.542.000,-

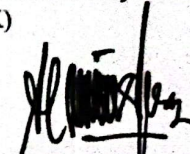
Total Rp. 1.139.995.250,-

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda



YOSUA LADEN, S.STP.,M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

Kabid. Ketahanan Ekososbud, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan
(PPTK)



Hj. SRI REPELETA, S.Sos.,M.Si
NIP. 19690127 200112 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : YOSUA LADEN, S.STP., M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA

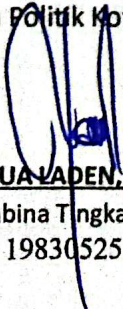
Selanjutnya disebut Pihak Kedua :

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

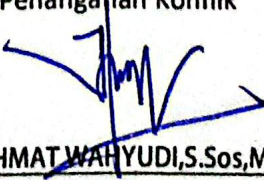
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 November 2025 ;

Pihak Kedua
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Samarinda


YOSUA LADEN, S.STP., M.SI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198305252001121003

Pihak Pertama
Kabid Kewaspadaan Nasional,
Dan Penanganan Konflik


ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 196801301994031009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
 Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100 %

Program :
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Anggaran

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

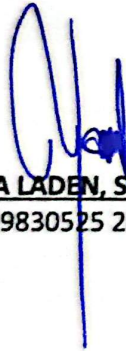
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp. 3.863.480.000,-
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp. 83.950.000,-

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

Rp. 1.334.900.000,-

Total Rp. 5.282.330.000,-

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda



YOSUA LADEN, S.STP., M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

Kabid. Kewaspadaan Nasional
(PPTK)



ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.Si.
NIP. 19680130 199403 1 009